Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)

Disusun Oleh:

Oesi Agustina. A

0910210075

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang dengan judul penelitian "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian kota Malang pada tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektivitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25%, dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah kota Malang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.

Kata Kunci: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian dan Otonomi Daerah

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform.* Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik.

Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Malang berdasarkan analisis

Rasio Keuangan pada APBD Kota Malang Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Malang.

B. TINJAUAN TEORI

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Berakhirnya Orde Baru menuntut reformasi pemerintahan dalam segala aspeknya, maka mulai tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Glosarry Word Bank dikemukakan bahwa desentralisasi adalah *" A process of transffering responsibily, authority, and accountability for specific or broad management function to lower levels within an organization, system or program ".* Dalam konteks ini, desentralisasi diartikan sebagai sebuah proses pemindahan tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai fungsi-fungsi manajemen secara khusus ataupun luas kepada aras yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sistem atau program.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarmya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Seiring dengan diterapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik diIndonesia. Oleh karena itu, dilaksanakan reformasi segala bidang meliputi reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik demi untuk mendukung terciptanya *good governance*.

Begitu juga Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan.

APBD Dalam Era Otonomi Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995:20) dalam Halim (2007: 16) adalah rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Di Era (pasca) reformasi, bentu APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasari pada peraturan-peraturan mengenai Otonomi Daerah terutama UU No. 22/1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32/2004 yang telah diubah menjadi UU No. 33/2004, PP No. 105/2000. Akan tetapi, karena untuk menerapkan peraturan yang baru diperlukan proses, maka untuk menjembatani pelaksanaan keuangan daerah pada kedua era tersebut dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.903/2375/SJ tanggal 17 November 2001. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi transisi dari UU No. 5/1974 ke UU No. 22/1999 yang kini telah diubah menjadi UU No. 32/2004.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD diperkirakan tidak akan terdiri dari dua sisi dan akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori yang baru yang belum ada di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menururt (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, (2002). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efisiensi

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya baya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

C. METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$Rasio\ KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \text{ x } 100\%$$

2. Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD

$$Rasio\ Efektivitas\ = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarka Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

3. Menghitung rasio Efisiensi berdasarkan APBD

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

4. Menghitungan rasio Aktivitas terdiri dari

$$Rasio\ Belanja\ Rutin\ terhadap\ APBD = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \text{ x } 100\%$$

5. Menghitung rasio Pertumbuhan terdiri dari

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun p} - \text{PAD tahun p}-1}{\text{PAD tahun p}-1} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan total pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun p} - \text{Pendapatan tahun p} - 1}{\text{Pendapatan tahun p} - 1} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan belanja rutin daerah} = \frac{\text{Belanja rutin tahun p} - \text{Belanja rutin tahun p} - 1}{\text{Belanja rutin tahun p} - 1} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan belanja pembangunan} = \frac{\text{Blj pemb tahun p} - \text{Blj pemb tahun p} - 1}{\text{Belanja pembangunan tahun p} - 1} \text{ x } 100\%$$

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Malang dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2007-2011.

Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

$$Rasio\ KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 1 **: Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Bantuan Pemerintah (DAK, DAU & DBH) Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011**

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2007	87.115.734.710,46	507.367.762.441,00	17,17	INSTRUKTIF
2008	83.403.547.594,61	579.412.291.881,00	14,39	INSTRUKTIF
2009	92.476.383.151,21	599.009.597.671,00	15,43	INSTRUKTIF
2010	113.490.265.808,78	626.023.144.999,00	18,12	INSTRUKTIF
2011	185.818.563.982,76	646.871.523.364,00	28,72	KONSULTATIF

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota Malang dan BPKAD Kota Malang (diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2007 s/d 2011 masih cukup rendah rata-rata 18,76% kurang dari 50%, yaitu pada tahun 2007 sebesar 17,17%, pada tahun 2008 sebesar 14,39%, tahun 2009 sebesar 15,43%, tahun 2010 sebesar 18,12% dan tahun 2011 sebesar 28,72%. Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang kurang baik meskipun pada tahun 2009 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan kembali dari 14,39% menjadi 15,43% atau 1,04% dari tahun 2008, namun pada tahun 2011 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari 18,12% pada tahun 2010 menjadi 28,72% pada tahun 2011.

Kenaikan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2009 disebabkan karena turunnya realisasi atas pendapatan non PAD pada tahun 2009 seperti dari hasil bukan pajak/ sumber daya alam dari sektor iuran hak pengusahaan hutan yang pada tahun 2008 terealisasi sebesar Rp 438.342.980,00 sedang pada tahun 2009 terealisasi hanya Rp 288.392.730,00 dan pertambangan minyak bumi pada tahun 2008 terealisasi Rp 3.584.920.111,00 turun menjadi Rp 1.858.366.537,00 pada tahun 2009. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan pada tahun 2009 hingga tahun 2011 disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan non PAD yaitu karena meningkatnya pendapatan dari DAK karena adanya DAK non reboisasi seperti DAK bidang jalan, DAK air bersih, DAK lingkungan hidup dan DAK pertanian.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarka Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2**:** **Analisis Rasio Efektivitas Target Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011**

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2007	82.875.966.418,00	87.115.734.710,46	105	SANGAT EFEKTIF
2008	82.213.442.771,93	83.403.547.594,61	101	SANGAT EFEKTIF
2009	92.772.122.460,02	92.476.383.151,21	99	EFEKTIF
2010	104.802.485.741,16	113.490.265.808,78	108	SANGAT EFEKTIF
2011	162.332.588.459,55	185.820.893.982,76	114	SANGAT EFEKTIF

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota Malang serta BPKAD Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan rasio efektivitas bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Malang cukup baik/efektif karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2007 s/d 2011 sebesar 105,4% seperti pada tahun 2007 sebesar 105%. Sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 kurang baik karena realisasinya menurun dan dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 101% pada tahun 2008 turun lagi dibawah target sebesar 99% pada tahun 2009, hal tersebut dikarenakan menurunnya realisasi pada beberapa pos-pos PAD seperti pajak daerah dan retribusi. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 efektivitas pengelolaan keuangan membaik yaitu sebesar 108% pada tahun 2010 kemudian naik pada tahun 2011 sebesar 114%. Realisasi rasio efektivitas tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi rasio efektivitas pada tahun 2009 karena pada tahun 2010 dan tun 2011 semua pos-pos PAD realisasinya diatas 100%.

Rasio Efisiensi

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya baya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 3: **Analisis Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Biaya yang Dikekluarkan untuk Memungut PAD Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2007	87.115.734.710,46	3.326.983.096,00	1,79	EFISIEN
2008	83.403.547.594,61	4.716.173.206,00	4,15	EFISIEN
2009	92.476.383.151,21	4.202.378.756,00	4,54	EFISIEN
2010	113.490.265.808,78	4.254.088.852,00	5,10	EFISIEN
2011	185.820.893.982,76	7.771.754.600,81	8,92	EFISIEN

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota Malang serta BPKAD Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Malang dimana pemerintah memberikan dana insentif untuk merealisasikan PAD secara maksimal sehingga mampu melakukan pelaksanaan anggarannya daerahnya baik/efisien meskipun terlihat rasio efisiensi Kota Malang setiap tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2007 sebesar 1,79%, tahun 2008 sebesar 4,15%, pada tahun 2009 sebesar 4,54%, pada tahun 2010 dan tahun 2011 rasio efisiensi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,10 pada tahun 2010 dan 8,92% pada tahun 2011. Dikarena pada tahun 2010 dan tahun 2011 Pemerintah Kota Malang menambah anggaran dialokasikan untuk biaya insentif yaitu pada pos retribusi daerah. Secara keseluruhan rasio efisiensi Kota Malang memiliki rata-rata sebesar 4,89% dengan demikian menunjukkan bahwa Kota Malang efisien dalam merealisasikan pendapatan asli daeranya (PAD) secara maksimal.

Rasio Aktivitas

Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktifitas dihitung sebagai berikut:

$$Rasio\ Belanja\ Rutin\ terhadap\ APBD = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4: **Analisis Rasio Aktivitas Total Belanja Rutin dan Pembangunan Terhadap Total APBD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011**

Tahun Anggaran	APBD (Rp)	Belanja Rutin (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	Belanja Rutin Terhdap APBD (%)	Belanja Pembangunan Terhadap APBD (%)
2007	649.952.517.958,55	495.905.673.319,02	154.046.844.639,53	76	23
2008	756.081.751.567,41	569.096.287.902,33	186.985.463.665,08	75	24
2009	840.134.950.348,84	610.189.698.412,75	229.945.251.936,09	72	27
2010	1.018.990.676.790,37	803.172.227.949,01	215.818.448.841.36	78	21
2011	1.118.652.929.915,68	938.531.103.372,14	180.121.826.543,54	83	16

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kota Malang serta BPKAD Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin sehingga rasio aktivitas terhadap APBD masih sangat rendah Dimana selama kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2007 s/d 2011 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan yaitu sebesar 76,8% untuk rasio aktivitas belanja rutin, sedangkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan hanya sebesar 22,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan. Sehingga diperlukan minimalisasi anggaran guna dialokasikan untuk belanja modal/pemabungan untuk kepentingan masyarakat.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun p} - \text{PAD tahun p}-1}{\text{PAD tahun p}-1} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan total pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun p} - \text{Pendapatan tahun p} - 1}{\text{Pendapatan tahun p} - 1} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan belanja rutin daerah} = \frac{\text{Belanja rutin tahun p} - \text{Belanja rutin tahun p} - 1}{\text{Belanja rutin tahun p} - 1} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan belanja pembangunan} = \frac{\text{Blj pemb tahun p} - \text{Blj pemb tahun p} - 1}{\text{Belanja pembangunan tahun p} - 1} \text{ x } 100\%$$

Tabel 5**:** **Data Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi Penerimaan Pendapatan, Realisasi Belanja Rutin, dan Realisasi Belanja Pembangunan Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja Rutin (Rp)	Realisasi Belanja Pembangunan (Rp)
2007	87.115.734.710,46	644.755.574.122,46	461.645,273.818,05	150.313.662.647,00
2008	83.403.547.594,61	724.328.420.101,61	534.589.559.092,23	152.745.939.302,00
2009	92.476.383.151,21	798.840.456.272,21	582.298.023.573,91	226.830.162.623,00
2010	113.490.265.808,78	988.288.099.524,78	762.543.079.954,95	205.424.565.364,64
2011	185.818.563.982,76	1.102.655.771.801,76	885.534.264.921,14	162.696.857.907,88

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan. Aset Kota Malang serta BPKAD Kota Malang

Tabel 5 merupakan data analisis rasio pertumbuhan realisasi pad, realisasi penerimaan pendapatan, realisasi belanja rutin, dan realisasi belanja pembangunan kota malang tahun anggaran 2007-2011. Sedangkan Tabel 6 merupakan hasil analisis rasio pertumbuhan apbd kota malang tahun anggaran 2007-2011

Tabel 6**:** **Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011**

No	Tahun	Rasio PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan
1	2007	39,80%	18,04%	9,48%	67,67%
2	2008	-4,2%	12,34%	15,80%	1,61%
3	2009	10,87%	10,28%	8,92%	48,50%
4	2010	63,73%	23,71%	16,12%	-20,79%
5	2011	22,72%	11,57%	30,95%	-9,43%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan. Aset Kota Malang serta BPKAD Kota Malang (diolah)

Pertumbuhan APBD Kota Malang tahun anggaran 2007 s/d 2011 menunjukkan pertumbuhan positif terutama pertumbuhan PAD mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2008 sempat mengalami penurunan sebesar -4,2% dikarenakan pada tahun 2008 Pemerintah Kota Malang tidak mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya (PAD) secara maksimal akibat beberapa pos PAD yang tidak dapat berkontribusi secara maksimal ditahun 2008. Namun di tahun-tahun selanjutnya rasio pertumbuhan PAD Kota Malang mengalami peningkatan kembali. Pertumbuhan pendapatan Kota Malang berfluktuatif dimana mengalami penurunan rasio pertumbuhan dari tahun 2007 s/d 2009 yaitu dari 18,04% pada tahun 2007 turun menjadi 10,28% pada tahun 2009%. Kemudian naik pada tahun 2010 sebesar 23,71% kemudian turun kembali sebesar 11,57%. Selain pendapatan, pertumbuhan belanja pemerintah Kota Malang yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan juga mengalami pertumbuhan. Dimana pada tahun 2008 rasio pertumbuhan belanja rutin lebih tinggi yaitu sebesar 15,80% dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 9,48% pada tahun 2007. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 8,92%. Selanjutnya pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 16,12% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 naik sebesar 30,95%. Hal tersebut disebabkan karena semua pos-pos belanja rutin seperti belanja administrasi umum, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan serta belanja tidak disangka mengalami kenaikan akibat pertumbuhan belanja pembangunan yang menurun.

Kesimpulannya bahwa rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang baik karena Pemerintah Kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan PAD dan pemerintah kota malang mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun Pemerintah Kota Malang memiliki rasio pertumbuhan rasio belanja yang kurang baik dikarenakan Pemerintah Kota Malang masik memprioritaskan belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan.

Hubungan Variabel Kinerja Keuangan Daerah dengan Tingkat Kemandiri Daerah, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi, Tingkat Aktivitas dan Tingkat Pertumbuhan Daerah.

Dari hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh adanya hubungan antara variabel kinerja keuangan daerah dengan beberapa variabel berikut yaitu variabel tingkat kemandirian daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan daerah. Hubungan setiap varibel tersebut tertera dalam tabel berikut:

Tabel 7: **Prosentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan**

Rasio		2007	2008	2009	2010	2011
Rasio Kemandiran Daerah (%)		17,17	14,39	15,43	18,12	28,72
Rasio Efektivitas (%)		105	101	99	108	114
Rasio Efisiensi (%)		1,79	4,15	4,54	5,1	8,92
Rasio Aktivitas	Belanja Rutin Terhadap APBD (%)	76	75	72	78	83
	Belanja Pembangunan Terhadap APBD (%)	23	24	27	21	16
Rasio Pertumbuhan	PAD (%)	39,8	-4,2	10,87	22,72	63,73
	Pendapatan (%)	18,04	12,34	10,28	23,71	11,57
	Belanja Rutin (%)	9,48	15,8	8,92	16,12	30,95
	Belanja Pembangunan (%)	67,67	1,61	48,5	-20,79	-9,43

Sumber: Analisis Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan (data diolah)

Bahwasanya secara keseluruhan hubungan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Malang dengan beberapa variabel seperti tingkat kemandirian daerah memiliki hubungan yang instruktif dikarenakan tingkat rasio kemandirian keuangan daerahnya memiliki rata-rata 18,76% namun demikian Pemerintah Kota Malang masih bisa dikatakan berusaha untuk mandiri terlihat dari meningkat setiap tahunnya. Selain berusaha untuk mandiri Pemerintah Kota Malang sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya terlihat dari

rata-rata rasio efektifnya sebesar 105,4%. Selain efektif kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Malang efisien dalam memberikan anggaran yang dialokasikan untuk biaya intensif untuk memungut pendapatan asli daerahnya secara maksimal terlihat dari rata-rata rasio efisiensinya sebesar 4,89%. Namun Pemerintah Kota Malang masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan dimana rata-rata rasio aktivitas belanja rutin sebesar 76,8% yang lebih besar dibandingkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembanguna yang hanya sebesar 22,2%. Selanjutnya rasio pertumbuhan Kota Malang memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik pada pertumbuhan PAD, pendapatan daerah dan belanja rutin terbukti dari rasio pertumbuhan yang mengalami *trend* positif, sedangkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk pembiayaan belanja pembangunan masih sangat rendah karena rasio pertumbuhannya mengalami *tren* negatif. Maka Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat meminimalisasikan an anggaran daerahnya untuk belanja rutin, dan mengalokasikannya untuk belanja pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan , rata-rata kinerja pengeloaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,76% (<25%), rasio efektivitas prosentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi Kota Malang prosentase rata-ratanya e dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Malang di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan Kota Malang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami *trend* positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami *trend* negatif (Belanja Daerah).

Saran

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap ratio pengelolaan keuangan terhadap APBD kota Malang serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Malang antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta wewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh Pemerintah Pusat / Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
2. Diharapkan Pemerintah Kota Malang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat melalui memingkatkan pembiayaan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat serta diimbangi dengan perluasan lapangan kerja seperti merevitaslisai pertanian, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan askses UKM kepada daya produktif, dan meningkatkan ketahanan panganagar pendapatan masyarakat Kota Malang meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat juga akan meningkat
3. Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan pembangunann serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Malang dan untuk menarik investor. Dimana pemerintah juga harus selektif dalam melakukan pembangunan yang didasarkan atas skala prioritas dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

_____, *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*

_____, *UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

_____, *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

_____, *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*

_____, *UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

_____, *UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah*

Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

Hidayat. S. 2008. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State-Society Relation.* Jurnal Politik, Vol. 1. Universitas Nasional. Jakarta

Landiyanto. E. A, 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Erlangga. Surabaya. Vol. 1

Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keauangan Daerah*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Andi. Yogyakarta

Mente. L. 2010. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Muslim Indonesia. Makassar. Vol.11

Nasir dan Darlis. 2012. Analisa Kinerja Keuan.gan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Al Fino Losa*. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1

Sularso. H dan Restianto. Y. E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto

Sidik. M. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.* Jurnal Orasi Ilmiah. STIA LAN. Bandung.

Wayong. J. 1987. Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Ichtiar.

Wasistiono. S. 2010. Menuju Desentralisasi Berkesinambungan. Jurnal Ilmu Politik AIPI. IPDN.

Wahyuni. N, 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Akuntansi*. Malang